



Pendampingan Identifikasi Isu Kebijakan dan Penyusunan Policy Brief bagi Pejabat Eselon III Pemerintah Kabupaten Way Kanan

Syarief Makhya¹, Maulana Mukhlis²

^{1,2} Universitas Lampung, Indonesia

ABSTRACT

POLICY ISSUES IDENTIFICATION AND THE MAKING PREPARATION OF POLICY BRIEF FOR ECHELON III OFFICIALS OF WAY KANAN DISTRICT. The ability to set agendas in a comprehensive approach from the stage of identifying policy issues or public issues to compiling recommendations in the form of policy briefs has not been widely carried out within Way Kanan District. Therefore, the targets in this service are (a) disseminating understanding of the role of local governments in solving public problems through various public policy approaches; (b) giving participants an understanding of the characteristics of public policy issues and (c) providing technical skills in preparing a policy brief. Through mentoring methods (lectures, outreach, counseling, and preparation practices), the results of service supported from pre-test and post-test data have been able to improve the aspects of knowledge, attitudes, and commitments of echelon III officials regarding concepts and strategies for identifying issues and formulating policy briefs as well as making a positive contribution to increase the awareness and confidence of echelon III officials in formulating policy recommendations and public policy making practices in Way Kanan District. In terms of behavior, the service instrument shows optimism that the quality of public policies created by Way Kanan Regional Government will be better, both in terms of the preparation process and in the aspects of policy substance.

Keywords: Agenda Setting, Policy Brief, Policy Issue.

Received:	Revised:	Accepted:	Available online:
03.08.2020	24.03.2021	05.05.2021	25.05.2021

Suggested citation:

Makhya, S., & Mukhlis, M. (2021). Pendampingan identifikasi isu kebijakan dan penyusunan policy brief bagi pejabat eselon III Pemerintah Kabupaten Way Kanan. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(2), 351-362. <https://doi.org/10.30653/002.202062.539>

Open Access | URL: <http://ppm.ejournal.id/index.php/pengabdian/article/view/539>

¹ Corresponding Author: Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Lampung; Jalan Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedong Meneng, Bandar Lampung, Indonesia. Email: maulanamukhlis1978@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat dan proses penyelenggaraan pemerintahan, tidak pernah sekalipun masyarakat dan pemerintah terbebas dari masalah isu kebijakan atau problema publik. Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, isu kebijakan tidak pernah berhenti dan akan terus berkembang secara dinamik sejalan dengan tingkat perkembangan masyarakat dan realitas sosial-politik yang sedang berjalan. Semakin kompleks masyarakat, maka masalah yang dihadapi juga akan semakin rumit dan kemudian akan semakin beragam isu kebijakannya (Wahab, 2008).

Dalam perspektif sistem kebijakan, isu dan substansi masalah kebijakan setiap daerah tidak akan pernah sama antar satu daerah dengan daerah lainnya. Hal tersebut akan sangat ditentukan oleh lingkungan kebijakannya. Tugas pemerintah daerah dalam merespons isu kebijakan tersebut yaitu dengan membuat kebijakan sehingga masalah publik yang dihadapi oleh masyarakat dapat diatasi atau diselesaikan secara baik dan efektif. Tradisi melakukan evaluasi kebijakan yang sifatnya substantif di lingkungan pemerintah daerah sejauh ini belum dipahami secara komprehensif, karena selama ini evaluasi yang dilakukan masih menekankan hanya pada aspek formal administratif, penyerapan anggaran, dan kepatuhan terhadap prosedur dan aturan-aturan formal yang berlaku.

Di samping itu, dalam mengeksekusi keputusan publik, pendekatan pemecahan masalahnya juga masih menggunakan metode konvensional yaitu dengan pendekatan normatif, inkremental (menyempurnakan kebijakan yang sudah ada), duplikasi keputusan yaitu dengan mencontoh keputusan di daerah lain, atau pemecahan masalah yang dipersepsikan secara dominan oleh kepala daerah dengan menggunakan pendekatan kekuasaan, baik secara langsung maupun tak langsung.

Pada perspektif praktik penyelenggaraan pemerintahan di daerah, kemampuan mengidentifikasi isu kebijakan atau masalah publik dalam pendekatan yang komprehensif belum banyak dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, karena sejauh ini masalah publik selalu dikaitkan dengan cara pandang yang normatif yaitu diukur oleh aturan-aturan formal yang berlaku atau meletakkan masalah publik secara sektoral berdasarkan tupoksi perangkat daerah masing-masing.

Selain itu, dalam mengambil keputusan sering tidak didukung data yang cukup dan kemampuan analisis untuk menjelaskan hubungan sebab akibat dari masalah kebijakan dan sejumlah variabel yang mempengaruhinya (Winarno, 2002). Oleh karena itu, keputusan yang diambil sering tidak cukup efektif dalam memecahkan masalah publik yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam konteks ini, maka peningkatan kemampuan dalam hal identifikasi isu kebijakan dan penyusunan *policy brief* perlu dilakukan.

Policy brief atau risalah kebijakan adalah penulisan untuk membuat dan memilih alternatif kebijakan tertentu atau tindakan yang diambil dalam perdebatan suatu kebijakan tertentu yang memiliki posisi sekaligus peran sangat penting sebagai salah satu media atau alat komunikasi yang cukup berpengaruh dalam proses pengambilan kebijakan publik. Secara khusus, Irawati (2017) menegaskan bahwa *policy brief* memiliki fungsi advokasi dan fungsi eksplorasi. Berdasarkan pemikiran di atas, pengabdian kepada masyarakat diikhtirakan sebagai upaya memberikan pelatihan dan pendampingan kepada aparatur pemerintah di Way Kanan, khususnya para pejabat

yang memiliki kewenangan memberikan telaah dan rekomendasi kebijakan kepada pejabat untuk mengambil keputusan secara tepat dan komprehensif.

METODE

Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pendampingan identifikasi isu kebijakan dan penyusunan *policy brief* bagi pejabat eselon III Pemerintah Kabupaten Way Kanan ini terdiri atas beberapa solusi atau upaya yang perlu dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan yang dihadapi atau situasi saat ini yang dialami mitra yakni Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Masalah-masalah tersebut sebagaimana diuraikan pada tabel 1.

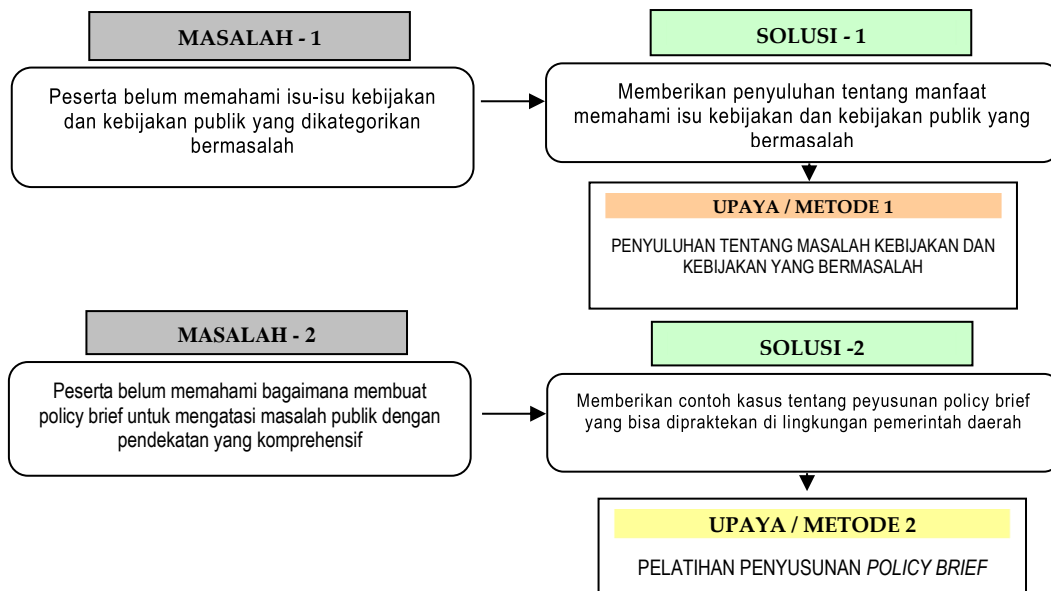
Tabel 1. *Metode penyelesaian atau solusi atas permasalahan mitra*

Permasalahan Mitra	Solusi	Metode Solusi
Aparatur pemerintah daerah terutama yang memiliki tupoksi pengembangan kebijakan masih belum memahami isu-isu kebijakan dan kebijakan publik yang dikategorikan bermasalah	Memberikan penyuluhan tentang manfaat memahami isu kebijakan dan kebijakan publik yang bermasalah	Peserta mengerti isu kebijakan dan kebijakan publik yang bermasalah
Aparatur pemerintah daerah banyak yang belum memahami bagaimana membuat <i>policy brief</i> untuk mengatasi masalah publik dengan pendekatan yang komprehensif	Memberikan contoh kasus tentang penyusunan <i>policy brief</i> yang bisa dipraktikkan di lingkungan pemerintah daerah	Peserta dapat memahami dan mempraktikkan menyusun <i>policy brief</i> .

Sumber: Hasil Mapping Pra Pengabdian, 2020.

Gambar 1 menguraikan relasi antara masalah yang dihadapi oleh mitra serta metode dan upaya penyelesaian masalah dalam bentuk tahapan dan kondisi ideal yang diharapkan pasca pengabdian.

Gambar 1. *Bagan Desain Metode Upaya Pemecahan Masalah Melalui Pengabdian*



Berdasarkan relasi antara masalah dan tawaran solusi serta upaya/metode atas masalah yang dihadapi, secara substansi deskripsi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut:

- Sesi 1 : Pengantar Penyusunan *Policy Brief*
 Sesi 2 : Identifikasi Isu Strategis dalam Penyusunan *Policy Brief*
 Sesi 3 : *Action Plan* Desain *Policy Brief*
 Sesi 4 : *Action Plan* Presentasi *Policy Brief*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kegiatan Pengabdian

Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk pelatihan identifikasi isu kebijakan dan penyusunan *policy brief* bagi aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan ini terdiri atas beberapa jenis kegiatan atau pertemuan yang secara detail tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 2. *Jadwal Pelaksanaan Kegiatan dalam Pengabdian*

Pertemuan 1	Sosialisasi Internal kepada Sekretaris Daerah Way Kanan
Pertemuan 2	Pengantar Konsep <i>Policy Brief</i>
Pertemuan 3	Strategi Identifikasi Isu Kebijakan
Pertemuan 4	Penyusunan Desain <i>Action Plan Policy Brief</i>
Pertemuan 5	Presentasi <i>Action Plan</i>

Sosialisasi Internal kepada Sekretaris Daerah

Kegiatan sosialisasi internal dilakukan oleh Tim Pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan kunjungan ke Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan, pada 4 Juni 2020. Secara administratif, kunjungan ini dalam rangka menyampaikan maksud dan tujuan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian. Adapun secara substantif, sosialisasi ini dalam rangka penyamaan persepsi antara Tim Pelaksana pengabdian FISIP Universitas Lampung dengan Pemerintah Kabupaten Way Kanan tentang perlunya pelatihan identifikasi isu kebijakan dan penyusunan *policy brief* dilakukan.

Hasil sosialisasi internal ini menunjukkan bahwa secara praktis, para pejabat terutama eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan memang masih memiliki keterbatasan kemampuan dalam mendesain kebijakan publik secara rasional dan substantif berbasis data dan atau pengetahuan. Fakta ini semakin menguatkan perlunya kegiatan pengabdian yang akan dilakukan terutama berfokus pada penyusunan *policy brief* dalam tahap formulasi kebijakan.

Formulasi kebijakan harus dilakukan berdasarkan kebutuhan secara langsung atau tidak langsung yang diawali dengan proses pengamatan, penelitian, pengkajian dan berbagai analisis sebelum rumusan kebijakan itu ditetapkan; mulai dari penyerapan aspirasi masyarakat sehingga dapat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat (Parson, 1997). Satu hal lain yang sangat penting adalah bahwa masyarakat (publik)

harus mengetahui secara transparan proses perumusan kebijakan yang sedang berjalan sehingga tujuan dan output atau produk kebijakan sudah diketahui sejak awal.

Ceramah Pengantar Konsep *Policy Brief*

Kegiatan ceramah pengantar konsep *policy brief* dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2020 bertempat di Ruang Rapat Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dengan dibuka langsung oleh Sekda Kabupaten Way Kanan yang diikuti oleh sebanyak 28 (dua puluh) delapan pejabat eselon III di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.

Secara substansi kegiatan diawali dengan pemberian *pre-test* kepada seluruh pesertasehingga dapat diketahui pengetahuan dasarnya terkait materi pengabdian yang dilakukan. Dalam pemaparan selanjutnya, tim pengabdian kepada masyarakat menyampaikan bahwa sedikitnya ada empat karakteristik suatu masalah dapat disebut sebagai masalah publik (Badjuri & Yuwono, 2002).

Pertama, ketergantungan di antara berbagai masalah karena permasalahan kebijakan bukanlah masalah yang berdiri sendiri karena biasanya merupakan bagian dari seluruh rangkaian masalah yang terkait satu sama lain. *Kedua*, subyektivitas masalah kebijakan dalam artian bahwa masalah kebijakan berangkat dari hasil pemikiran yang dibuat pada lingkungan atau kondisi eksternal tertentu, maka penting untuk membedakan antara situasi masalah dengan masalah kebijakan. Hal ini perlu ditegaskan karena masalah merupakan abstraksi yang timbul dari transformasi pengalaman ke dalam penilaian manusia sehingga sangat mungkin bersifat subjektif antara satu orang (pihak) dengan orang (pihak) lainnya. Proses *agenda setting* akan membuat masing-masing pihak menyepakati adanya masalah bersama menjadi agenda kebijakan dengan ragam aliran dalam proses ini (Kingdon, 2002).

Ketiga, sifat buatan dari masalah dalam arti bahwa masalah kebijakan memang merupakan produk penilaian subyektif namun bisa didefinisikan sebagai kondisi sosial yang obyektif. Masalah tidaklah berada di luar manusia dan kelompoknya, artinya suatu permasalahan yang ada di dalam masyarakat dengan sendirinya merupakan masalah kebijakan. *Keempat*, dinamika masalah kebijakan akan berkembang sehingga solusi terhadap masalah bisa berubah di waktu atau lokasi yang berbeda. Masalah publik yang sama belum tentu dapat dipecahkan dengan kebijakan yang sama pula, terutama saat konteks lingkungannya berbeda.



Gambar 2. Kegiatan Ceramah Tentang Pengantar Konsep *Policy Brief*

Selanjutnya terkait dengan konsep *policy brief* yaitu sebagai sebuah dokumen yang menguraikan dasar rasional dalam penilaian sebuah alternatif kebijakan. *Policy brief* adalah bentuk publikasi yang secara spesifik ditujukan untuk memberikan rekomendasi kebijakan sejak awal proses perumusan kebijakan sampai dengan lahirnya produk kebijakan. *Policy brief* juga merupakan alat untuk menjelaskan secara singkat arti penting hasil penelitian, bagaimana hasil penelitian menjawab permasalahan yang ada, serta apa rekomendasi yang disarankan terhadap masalah kebijakan yang dihadapi (Pochrel, et.al, 2017).

Penyuluhan Strategi Identifikasi Isu Kebijakan

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2019 yang diikuti oleh sebanyak 28 (dua puluh delapan) pejabat eselon III sebagai kelanjutan dari sesi sebelumnya atau sesi kedua dari kegiatan penyampaian materi. Tema utama pada sesi ini adalah bagaimana strategi identifikasi isu kebijakan dilakukan oleh seorang formulator dengan kewenangan yang dimilikinya.

Kebijakan sebagai instrumen pengelolaan pemerintahan merupakan mata rantai utama dalam operasionalisasi fungsi pemerintahan. Sebagai mata rantai utama, jika kebijakan itu keliru atau tidak tepat dalam menangani persoalan di dalam negara, konsekuensinya adalah kegagalan pemerintah dalam fungsi implementatifnya (Dunn, 2004). Permasalahan kebijakan yang terjadi umumnya baru dirasakan saat sebuah kebijakan tersebut dilaksanakan, para pembuat kebijakan atau pelaksana baru menjerit dan sadar akan kesalahannya ketika terjadi kondisi implementasi yang buruk.

Sebuah kebijakan lahir karena ada suatu masalah yang hendak dipecahkan (Abidin, 2004). Oleh karena itu, kebijakan merupakan alat atau cara untuk memecahkan masalah yang sudah ada sehingga dalam hal ini yang menjadi dasar pembuatan kebijakan adalah masalah. Jika tidak ada masalah tidak perlu ada suatu kebijakan baru.

Selanjutnya Wahab (2008) menjelaskan bahwa isu dalam pemahamannya memiliki makna yang berbeda-beda. Dalam pembicaraan sehari-hari isu sering diartikan sebagai kabar burung dalam pemahaman orang awam, sedangkan dalam analisis kebijakan publik, dalam makna yang terkandung makna isu bukanlah seperti apa yang umum dipahami oleh orang awam tersebut. Sekalipun harus diakui dalam berbagai literatur istilah isu itu tidak pernah dirumuskan dengan jelas, namun sebagai suatu "*technical term*", utamanya dalam konteks kebijakan publik, muatan maknanya lebih kurang sama dengan apa yang kerap disebut sebagai masalah kebijakan. Isu kebijakan lazimnya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan di tempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan itu sendiri.

Menurut Wahab (2008) beberapa dari kriteria yang penting untuk dijadikan dasar menetapkan isu publik sebagai agenda kebijakan publik, adalah:

- 1) Isu tersebut telah mencapai suatu titik kritis tertentu, sehingga ia praktis tidak lagi bisa diabaikan begitu saja, atau ia telah dipersepsikan sebagai suatu ancaman serius yang jika tak segera diatasi justru akan menimbulkan luapan krisis baru yang jauh lebih hebat di massa datang.
- 2) Isu tersebut telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak (*impact*) yang bersifat dramatik.

- 3) Isu tersebut menyangkut emosi tertentu dilihat dari sudut kepentingan orang banyak, bahkan umat manusia pada umumnya, dan mendapat dukungan berupa liputan media masa yang luas.
- 4) Isu tersebut menjangkau dampak yang amat luas.
- 5) Isu tersebut mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan (legitimasi) dalam masyarakat.
- 6) Isu tersebut menyangkut suatu persoalan yang fasionabel, di mana posisinya sulit untuk dijelaskan tapi mudah dirasakan kehadirannya.



Gambar 3. Penyuluhan Identifikasi Isu Kebijakan

Penyusunan Desain Action Plan Policy Brief

Kegiatan penyusunan desain *action plan* ini dilakukan pada tanggal 3 Juli 2020 yang diikuti oleh 20 (dua puluh) peserta pejabat eselon III yang telah mengikuti pertemuan sebelumnya. Tim pengabdian melakukan pendampingan secara penuh waktu diawali dengan penyampaian desain *policy brief*.

Isu atau masalah yang diangkat dalam *policy brief* merupakan sintesa dari berbagai informasi yang diperoleh dari bukti di lapang dan study literatur, sehingga pembuat kebijakan dengan memahami inti dari masalah/isu, latar belakang masalah/isu, para pemangku kepentingan yang terlibat, serta rekomendasi cara mengatasi masalah/isu tersebut. Bahan tersebut dapat dilengkapi dengan tabel dan grafik serta daftar referensi singkat. Hal ini akan memudahkan pembuat kebijakan mudah mencari informasi lebih lanjut. *Policy Brief* umumnya dilengkapi "Ringkasan Eksekutif" sekitar satu halaman untuk memudahkan pembuat kebijakan dengan cepat memahami esensi laporan tersebut. Tujuan *Policy Brief* adalah untuk meyakinkan pembuat kebijakan tentang urgensi dari masalah dan perlunya mengadopsi pilihan alternatif tindakan atau cara mengatasi masalah tersebut (Young & Quinn, n.d.).

Policy brief memiliki kelebihan ringkas, bias segera dibuat, spesifik, dan mendorong logika kebijakan (Dwiyanto, 2012). Secara detail, komponen *policy brief* (Tsai dalam JKKI, 2006), adalah:

1) Ringkasan Eksekutif

Ringkasan eksekutif bertujuan untuk meyakinkan pembuat kebijakan bahwa laporan yang singkat tersebut merupakan hasil investigasi/studi yang cukup mendalam.

Sehingga pembuat kebijakan setelah membaca secara cepat dapat segera memahami relevansi dan pentingnya masalah yang dipalorkan. Ringkasan eksekutif umumnya meliputi: a) deskripsi masalah yang harus segera diatasi, b) alasan atau argumentasi tentang mengapa kebijakan yang ada saat ini perlu diubah atau diperbaiki, dan c) rekomendasi untuk mengatasi masalah.

2) Konteks dan pentingnya masalah

Elemen berisi argumen untuk meyakinkan kepada pembuat kebijakan bahwa saat ini ada masalah penting dan mendesak yang mengharuskan pembuat kebijakan segera mengambil keputusan atau tindakan. Konteks dan pentingnya masalah ditempatkan pada bagian awal pendahuluan dari *policy brief* yang berisi: a) argumen atau pernyataan yang jelas tentang masalah atau isu yang harus diperhatikan, b) suatu gambaran singkat dari akar penyebab masalah, dan c) pernyataan tentang implikasi kebijakan dari masalah tersebut

3) Kritik pilihan kebijakan

Elemen ini menjelaskan kekurangan/kelemahan dari kebijakan yang sedang dilaksanakan saat ini dan perlu adanya perubahan kebijakan, serta fokus di mana perubahan tersebut harus dilakukan. Umumnya kritik terhadap kebijakan yang telah ada mencakup a) gambaran singkat dari pilihan kebijakan dan b) argumen yang menjelaskan mengapa dan bagaimana pendekatan kebijakan saat ini mengaami kegagalan.

4) Rekomendasi kebijakan

Tujuan dari elemen rekomendasi kebijakan adalah memberikan usulan yang rinci dan meyakinkan bahwa kebijakan yang ada saat ini harus diubah. Umumnya elemen ini mencakup a) langkah-langkah praktis yang perlu diimplementasikan dan b) kadang juga termasuk paragraf penutup yang menekankan pentingnya aksi atau tindakan.

5) Lampiran

Meskipun laporan ini singkat dan khusus untuk pembuat kebijakan, penyusun *policy brief* kadang menambahkan lampiran data dukung. Lampiran tersebut perlu dipertimbangkan, jika memang betul-betul sangat diperlukan. Namun dapat tidak dilampirkan jika secara substansi diyakinkan sudah tidak menimbulkan penafsiran ganda dari publik.

Diskusi Dengar Pendapat Presentasi *Policy Brief*

Kegiatan dengar pendapat ini dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2020 dengan pelibatan seluruh peserta pengabdian bertempat di ruang rapat utama Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan. Seluruh pejabat eselon III menyampaikan hasil penyusunan *policy brief* sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan pada masing-masing unit kerjanya.

Pemaparan terutama dikaitkan dengan dua fungsi *policy brief* (Irawati, 2017) yaitu fungsi advokasi yaitu memberikan pilihan terhadap sebuah solusi. Dengan fungsi ini, *policy brief* menjawab pertanyaan mengapa harus memilih kebijakan tersebut serta apakah keberhasilan yang akan didapat. Fungsi kedua adalah fungsi eksplorasi yaitu memberikan informasi tentang hal-hal yang harus dipersiapkan atau dilakukan jika

suatu kebijakan dipilih sehingga fungsi ini menjawab apakah jenis dan berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu kebijakan.



Gambar 4. Action Plan: Penyusunan dan Presentasi Policy Brief

Analisa Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Analisa Kuantitatif

Dalam rangka mengevaluasi dan melihat kemanfaatan hasil pengabdian terutama kegiatan pelatihan strategi identifikasi isu kebijakan dan penyusunan *policy brief* maka dilakukan *pre-test* dan *post test* terhadap seluruh peserta (para pejabat eselon III). Pertanyaan *pre-test* yang dilakukan sebelum pelatihan dilaksanakan dan pertanyaan *post-test* yang dilakukan setelah sosialisasi sebagian besar adalah pertanyaan yang sama sehingga dapat diketahui tingkat perbandingannya antara sebelum dan setelah pelatihan ini dilakukan, meskipun juga terdapat pertanyaan tambahan selain pertanyaan utama dalam *pre test*.

Hasil rekapitulasi jawaban dari 20 (dua puluh) pimpinan unit eselon III tentang pengenalan terhadap istilah *policy brief* menunjukkan bahwa hanya 5 (lima) yang sudah mengetahuinya, sedangkan yang belum mengetahui sebanyak 15 (lima belas) peserta. Berikutnya, hasil rekapitulasi jawaban dari 20 (dua puluh) pimpinan unit eselon III terhadap pengetahuan tentang penggunaan *policy brief* melalui pendidikan atau pelatihan yang diikuti menunjukkan bahwa hanya 2 (dua) peserta yang sudah pernah mendapatkannya, sedangkan yang belum mendapatkan pendidikan atau pelatihan mengenai *policy brief* sebanyak 18 (delapan belas) peserta.

Terkait dengan pertanyaan apakah dalam pengambilan kebijakan/keputusan di unit kerja selama ini telah menggunakan pendekatan *policy brief*, hasil jawaban peserta menunjukkan bahwa seluruh unit kerja atau sebanyak 20 (dua puluh) peserta belum menggunakan *policy brief* dalam pengambilan keputusan di masing-masing unit kerja. Pertanyaan keempat tentang apakah peserta pengabdian selalu diminta apabila ada permasalahan yang mendesak terkait kewenangan untuk membuat rekomendasi kebijakan kepada atasan menunjukkan bahwa sebanyak 12 (dua belas) peserta selalu diminta oleh pimpinan untuk merekomendasikan usulan kebijakan atau keputusan sesuai dengan tugas pokok atau kewenangan yang dimiliki oleh unit kerjanya. Adapun

sebanyak 4 (empat) orang menjawab kadang-kadang saja, sedangkan 4 (empat) lainnya selama ini belum atau tidak diminta memberikan rekomendasi kebijakan kepada atasannya.

Adapun analisis lanjutan menunjukkan data bahwa sebanyak 12 (dua) belas peserta atau pejabat eselon III di Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan masih mengalami kesulitan dalam menyusun rekomendasi kebijakan. Sebanyak 6 (enam) peserta terkadang masih mengalami kesulitan dan 6 (enam) pejabat lainnya tidak mengalami kesulitan dalam merekomendasikan kebijakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas dan kapasitas pejabat dalam menyusun kebijakan publik (termasuk *policy brief* di dalamnya) masih memerlukan perbaikan.

Data pada pertanyaan 1 sampai dengan 5 menunjukkan kondisi faktual yang mengkonfirmasi adanya asumsi dan pengakuan yang disampaikan oleh Sekda Way Kanan bahwa kompetensi para aparatur pemerintah terutama para pejabat eselon III dalam menyusun kebijakan publik masih rendah. Dalam perspektif ini, maka rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam pengabdian adalah salah satu solusi yang perlu dilakukan sehingga kemampuan aparatur pemerintahan (terutama pejabat eselon III) dalam menyusun kebijakan publik secara baik akan semakin meningkat.

Pasca rangkaian pengabdian yang dilakukan, kemudian dilakukan pertanyaan yang sebagian besar serupa dengan pertanyaan dalam *pre test*. Pada pertanyaan pertama apakah peserta sudah paham/mengerti cara membuat *policy brief* atau risalah kebijakan pasca pengabdian dilakukan menunjukkan bahwa sebanyak 60% atau sebanyak 12 (dua belas) peserta sudah mengetahuinya meskipun masih terdapat sebanyak 40% yang masih kurang mengerti. Adapun yang membuat optimisme hasil pengabdian dapat terlaksana dengan baik adalah tidak ada peserta yang tidak mengerti atau 0 (nol) peserta dari sebelumnya terdapat 15 (lima belas) peserta yang tidak mengetahuinya.

Pada pertanyaan berikutnya dalam *post test* yaitu apakah materi penyusunan *policy brief* bermanfaat dalam menyusun rekomendasi kebijakan, seluruh peserta atau sebanyak 100% menyatakan bermanfaat dan sangat bermanfaat. Data ini menunjukkan bahwa secara substansi, materi pembekalan memberikan manfaat nyata dalam hal meningkatkan kepercayaan diri para pejabat eselon III dalam merekomendasikan kebijakan publik secara baik dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Analisa Kualitatif

Hasil pendampingan berhasil memberikan keyakinan kepada Tim Pelaksana kegiatan pengabdian maupun kepada Pemerintah Kabupaten Way Kanan bahwa terdapat potensi dari para pejabat eselon III dalam melakukan identifikasi masalah kebijakan dan kemudian melakukan penyusunan risalah kebijakan (*policy brief*) sebagai bagian dari proses perumusan kebijakan publik di daerah. Meskipun terdapat sebanyak 40% yang belum yakin mampu melakukannya, hal tersebut lebih disebabkan oleh perlunya pengabdian lanjutan pasca pengabdian ini dengan tema atau topik yang lebih teknis.

Hasil *post test* menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi kesulitan peserta dalam menyusun *policy brief* adalah faktor validitas data yang masih sangat lemah sebagai basis penyusunan rekomendasi (sebesar 40%), faktor kepercayaan diri dalam menyusun rekomendasi (30%), faktor kelemahan dalam metode penulisan (15%) serta

faktor regulasi yang belum memungkinkan masuknya *policy brief* sebagai prosedur formal dalam penyusunan kebijakan publik di tingkat daerah. Sebagaimana diketahui, selama ini perumusan kebijakan hanya menggunakan istilah telaah staf atau nota dinas sehingga istilah *policy brief* belum merupakan istilah yang secara normatif wajib disusun dalam penyusunan kebijakan di tingkat daerah.

Hasil *post test* juga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian terkait dengan problem yang akan dihadapi dalam penyusunan *policy brief* ini. Beberapa persoalan yang teridentifikasi menjadi masalah dalam penyusunan *policy brief* diantaranya adalah masih minimnya kesempatan dari pimpinan (30%), kesulitan mencari data yang valid dan dipercaya seluruh pihak (30%), adanya kewenangan pada pejabat eselon III untuk menyusun rekomendasi kebijakan (15%), aturan pemerintah pusat yang belum memungkinkan (15%), serta kesempatan untuk mengaktualisasikan peran tanpa dianggap melebihi batas kewenangan (10%).

Oleh karena itu strategi penting dalam upaya peningkatan kapasitas dan implementasi penggunaan *policy brief* dalam penyusunan kebijakan publik di tingkat daerah adalah dengan melakukan pembinaan lanjutan termasuk di dalamnya advokasi revisi peraturan pada tingkat pusat. Pertanyaan terakhir dalam *post test* yaitu apakah perlu pelatihan lanjutan untuk memperluas pemahaman penyusunan materi kebijakan yang lain, misalnya penyusunan paper kebijakan termasuk pendalaman *policy brief*, data menunjukkan bahwa sebanyak 100% peserta menyatakan masih sangat perlu terutama melakukan praktik nyata sesuai dengan kewenangan unit kerjanya, pelatihan strategi mendapatkan data yang baik dan valid sejak melakukan identifikasi isu kebijakan sampai dengan penyusunan rekomendasi kebijakan, strategi memilih aturan di pusat yang lebih tepat dalam menentukan prioritas kebijakan, serta terutama strategi merubah *mindset* berpikir para pejabat setiap tingkatan tentang perlunya *policy brief* sebagai dasar merekomendasikan kebijakan di tingkat daerah.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul “pelatihan identifikasi isu kebijakan dan penyusunan *policy brief* bagi pejabat eselon III Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan ” ini telah mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan dalam konteks perubahan pemahaman peserta tentang konsep dan strategi identifikasi isu dan penyusunan *policy brief* (risalah kebijakan). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga telah memberikan kontribusi positif bagi upaya meningkatkan kesadaran dan kepercayaan diri para pejabat eselon III dalam menyusun rekomendasi kebijakan publik di daerah sesuai dengan kewenangan unit kerjanya. Peningkatan aspek pengetahuan, sikap, dan komitmen para pejabat eselon III yang didukung dari data *pre test* dan *post test* menunjukkan optimisme bahwa kualitas kebijakan publik yang dilahirkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan akan lebih baik.

Secara kuantitatif, berdasarkan hasil komparasi nilai pelaksanaan *pre-test* dan *post-test* telah diperoleh gambaran kumulatif yakni adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan serta kemauan peserta sebesar 60% dan adanya kebermanfaatan strategi *policy brief* sebanyak 100%. Hal ini berarti sebanyak 60% peserta telah mendapatkan pengetahuan secara maksimal serta memperoleh pemahaman yang komprehensif

tentang perlunya *policy brief* dalam proses perumusan kebijakan publik. Dari sisi keprilakukaan, instrumen pengabdian yang disampaikan juga telah mampu memberikan gambaran faktual terkait dengan optimisme pejabat eselon III dalam mengimplementasikan hasil pengabdian dalam praktik penyusunan kebijakan publik di Kabupaten Way Kanan.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung atas dukungan dana pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat skema unggulan Tahun Anggaran 2020. Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan, para pejabat eselon III yang terdiri atas kepala bagian dan sekretaris dinas/badan pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan atas berkenannya menjadi peserta sekaligus mitra pendampingan sehingga pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik dan sukses.

REFERENSI

- Abidin, S. Z. (2004). *Kebijakan publik*, Edisi revisi. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Badjuri, A. K., & Yuwono, T. (2002). *Kebijakan publik konsep & strategi*. Semarang: Undip Press.
- Dunn, W. N. (2004). *Public policy analysis: An Introduction*. London: Pearson Education.
- Dwiyanto, A. (2012). *Riset Kebijakan dan Cara Presentasi, Bahan Paparan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Irawati, E. et al. (2017). *Modul pelatihan lanjutan analisis kebijakan*. Jakarta: LAN RI.
- Kingdon, J. W. (2003). *Agendas, alternatives, and publik policies*. New York: Addison-Wesley Education Publishers.
- Parson, W. (1997). *Public policy: An Introduction to the theory and practice of policy analysis*. United Kingdom: Edward Elgar.
- Pokhrel, S., Owen, L., Coyle, K., & Coyle, D. (2017). *ROI in public health policy: Supporting decision making*. London: Palgrave Macmillan.
- Wahab, S. A. (2008). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Malang: UMM Press.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan proses kebijakan publik*. Jakarta: Med Press.
- Young, E., & Quinn, L. (2012). *Writing effective policy paper: a guide for policy advisers in central and eastern Europe*. Budapest: Open Society Institute and Local Government Public Service Reform.

Copyright & License



This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, & reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
© 2021 Syarief Makhya, Maulana Mukhlis.

Published by LPPM of Universitas Mathla'ul Anwar Banten in collaboration with the Asosiasi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (AJPKM)